



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Sekuritisasi Masyarakat (Societal) yang Dilakukan oleh Donald
Trump Terkait Isu Hadirnya Imigran Asal Tujuh Negara
Bersusuk Mayoritas Muslim sebagai Ancaman terhadap
Identitas Komunal Amerika Serikat melalui Kebijakan Travel Ban**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Program Studi Hubungan Internasional

Oleh

Ignatius Samon Adhisatya Bahi

2016330014

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Sekuritisasi Masyarakat (Societal) yang Dilakukan oleh Donald
Trump Terkait Isu Hadirnya Imigran Asal Tujuh Negara
Bersusuk Mayoritas Muslim sebagai Ancaman terhadap
Identitas Komunal Amerika Serikat melalui Kebijakan Travel Ban**

Skripsi

Oleh

Ignatius Samon Adhisatya Bahi

2016330014

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung
2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ignatius Samon Adhisatya Bahi
Nomor Pokok : 2016330014
Judul : Sekuritisasi Masyarakat (Societal) yang Dilakukan oleh Donald Trump Terkait Isu Hadirnya Imigran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim sebagai Ancaman terhadap Identitas Komunal Amerika Serikat melalui Kebijakan Travel Ban
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 17 Juni 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

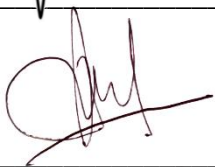
Ketua sidang merangkap anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

: 

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira

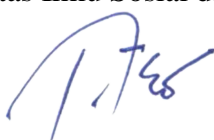
: 

Anggota

I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ignatius Samon Adhisatya Bahi

NPM : 2016330014

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Sekuritisasi Masyarakat (Societal) yang Dilakukan oleh Donald Trump Terkait Isu Hadirnya Imigran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim sebagai Ancaman terhadap Identitas Komunal Amerika Serikat melalui Kebijakan Travel Ban

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 5 Juni 2020



Ignatius Samon A. B.

2016330014

ABSTRAK

Nama : Ignatius Samon Adhisatya Bahi

NPM : 2016330014

Judul : Sekuritisasi Masyarakat (*Societal*) yang Dilakukan oleh Donald Trump Terkait Isu Hadirnya Imigran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim sebagai Ancaman terhadap Identitas Komunal Amerika Serikat melalui Kebijakan *Travel Ban*

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana Donald Trump melakukan sekuritisasi masyarakat (*societal*) terkait isu hadirnya imigran asal tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim sebagai ancaman terhadap identitas komunal Amerika Serikat melalui kebijakan *Travel Ban*?” *Travel Ban* sendiri merupakan salah satu kebijakan yang paling kontroversial pada masa kampanye pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2016. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari maraknya isu imigrasi ketika itu akibat timbulnya ancaman dari terorisme dan radikalisme di Amerika Serikat. Di balik fenomena ini, Donald Trump adalah sosok yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran publik akan perlunya terobosan di bidang imigrasi sekaligus memungkinkan terealisasinya kebijakan *Travel Ban* pada tahun 2017. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teori sekuritisasi versi Buzan, dkk. sebagai kerangka pemikiran. Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif, didukung oleh studi literatur dan studi berbasis dokumen untuk keperluan pengumpulan data. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Trump memiliki kaitan yang sangat erat dengan konteks politik yang tengah berlangsung pada saat itu, yaitu masa kampanye pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2016. Hal ini didukung oleh temuan bahwa pemilihan ketujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim sebagai sasaran dari kebijakan *Travel Ban* dilatarbelakangi oleh kepentingan Trump untuk memenangkan pemilu dan bahwa faktor kampanye sangat menentukan keberhasilan dari proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Trump.

Kata Kunci: *Travel Ban*, Sekuritisasi, Imigran, Amerika Serikat.

ABSTRACT

Name : Ignatius Samon Adhisatya Bahi

NPM : 2016330014

Title : Societal Securitization Conducted by Donald Trump Regarding the Presence of Immigrants from Seven Muslim Majority Countries as a Threat to the Communal Identity of the United States through Travel Ban Policy

This study aims to answer the question "how did Donald Trump conduct societal securitization regarding the presence of immigrants from seven Muslim majority countries as a threat to the communal identity of the United States through Travel Ban policy?" Travel Ban was one of the most controversial policies during the 2016 US presidential election campaign. This cannot be separated from the rise of immigration issues during that period due to the threat of terrorism and radicalism in the United States. Behind this phenomenon, Donald Trump was a figure who played an important role in building public awareness of the need for a breakthrough in the field of immigration while also enabling the realization of the Travel Ban policy in 2017. In conducting the analysis, the author uses Buzan et al.'s version of securitization theory as a frame of mind. Whereas the research methods used by the author is qualitative, supported by literature studies and document-based studies for data collection purposes. From the results of this study, the author concludes that the securitization process carried out by Trump had a very close relationship with the political context that was taking place at the time, namely the 2016 United States presidential election campaign. This is supported by findings that the designation of the seven Muslim majority countries as the target of Travel Ban policy was motivated by Trump's interest in winning the election and that the campaign factor determined the success of the securitization process carried out by Trump.

Keywords: *Travel Ban, Securitization, Immigrants, the United States of America*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat penyertaan-Nya, penelitian berjudul “Sekuritisasi Masyarakat (Societal) yang Dilakukan oleh Donald Trump Terkait Isu Hadirnya Imigran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim sebagai Ancaman terhadap Identitas Komunal Amerika Serikat melalui Kebijakan Travel Ban” dapat selesai pada waktunya. Selain untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana, penulis juga mendedikasikan penelitian ini untuk Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katholik Parahyangan. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi kontribusi keilmuan bagi prodi sekaligus referensi tambahan bagi seluruh peserta didik ke depan. Penulis pun memohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin diakibatkan oleh berbagai keterbatasan dalam menyusun penelitian ini. Untuk itu, segala bentuk kritik dan saran yang dapat membuat penelitian ini menjadi lebih baik akan sangat penulis hargai.

Bandung, 5 Juni 2020



Ignatius Samon A.B.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang dilimpahkan kepada penulis selama menempuh masa studi.

Kepada kedua orangtua dan adik penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan memenuhi semua kebutuhan penulis selama berkuliah.

Kepada Mas I Nyoman Sudira , Drs., M.Si. atas segala saran dan masukan yang telah diberikan selama membimbing penulis dalam melakukan penelitian.

Kepada segenap dosen dan tenaga pendidik di Unpar, khususnya Program Studi Hubungan Internasional yang telah membagikan ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang tak ternilai harganya.

Kepada semua sahabat dan teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu karena telah menemani dan mewarnai keseharian penulis selama berkuliah.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Pembatasan Masalah.....	6
1.4. Pertanyaan Penelitian.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.7. Kajian Pustaka.....	9
1.8. Kerangka Pemikiran.....	13
1.9. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.10. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II Isu Imigrasi di Amerika Serikat Menjelang Pemilu Presiden Tahun 2016 dan Ancaman terhadap Identitas Komunal Amerika Serikat Ban.....	30

2.1.	Gambaran Isu Imigrasi di Amerika Serikat Menjelang Pemilu Presiden Tahun 2016.....	30
2.1.1.	Imigran Muslim dan Komposisi Populasi Amerika Serikat.....	30
2.1.2.	Identitas Imigran Muslim di Bawah Sorotan Publik AS...	33
2.1.3.	Persepsi Imigran Muslim dan Publik Amerika Serikat terhadap Satu Sama Lain.....	37
2.2.	Imigran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim sebagai Existential Threat terhadap American Creed.....	44
2.2.1.	Kerentanan Societal Security Amerika Serikat terhadap Existential Threat Berupa Imigran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim.....	45
2.2.2.	Realita Kehadiran Imigran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim sebagai Existential Threat terhadap American Creed.....	47
2.2.2.1.	Budaya Islam sebagai Vulnerability bagi American Creed.....	48
2.2.2.2.	Pemenuhan Syarat Mempertahankan Survival American Creed dari Existential Threat Berupa Imigran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim	51

BAB III Proses Sekuritisasi Masyarakat (Societal) dalam Kampanye Donald Trump sebagai Calon Presiden Amerika Serikat Tahun 2016 melalui Kebijakan Travel Ban.....	58
3.1. Kampanye Donald Trump dalam Konteks Proses Sekuritisasi dan Kebijakan Travel Ban sebagai Solusi untuk Masalah Imigrasi di Amerika Serikat.....	58
3.1.1. Popularitas Donald Trump sebagai Modal untuk Melakukan Upaya Sekuritisasi.....	59
3.1.2. Pandangan Donald Trump terhadap Imigran Muslim di Amerika Serikat.....	62
3.1.2.1. Pidato Donald Trump di Mt. Pleasant, South Carolina.....	62
3.1.2.2. Wawancara Donald Trump dengan CNN.....	64
3.1.2.3. Pidato Donald Trump di Manchester, New Hampshire.....	65
3.1.3. Peran Media Massa dalam Upaya Sekuritisasi Donald Trump.....	68
3.1.4. Penerimaan Publik Amerika Serikat terhadap Kebijakan Travel Ban.....	72
3.2. Speech Act Donald Trump pada Masa Kampanye Pemilu Presiden Amerika Serikat Tahun 2016 dan Kebijakan Travel Ban sebagai Emergency Response.....	77
3.2.1. Unit Analisis dalam Speech Act Donald Trump.....	77

3.2.1.1.	American Creed sebagai Referent Object dalam Speech Act Donald Trump.....	78
3.2.1.2.	Donald Trump sebagai Securitized Actor pada Masa Kampanye Pemilu Presiden Amerika Serikat Tahun 2016.....	79
3.2.1.3.	Media Massa sebagai Functional Actor dalam Speech Act Donald Trump.....	85
3.2.2.	Facilitating Conditions bagi Speech Act Donald Trump..	87
3.2.2.1.	Facilitating Conditions Internal dalam Speech Act Donald Trump.....	87
3.2.2.1.1.	Grammar of Security dalam Speech Act Donald Trump.....	88
3.2.2.1.2.	Prosedur Keamanan dalam Speech Act Donald Trump.....	90
3.2.2.1.3.	Plot dalam Speech Act Donald Trump.....	91
3.2.2.2.	Modal Sosial sebagai Facilitating Condition Eksternal bagi Speech Act Donald Trump.....	96
3.2.2.3.	Persepsi Publik Amerika Serikat terhadap Imigran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim sebagai Facilitating Condition Eksternal bagi Speech Act Donald Trump.....	98

3.2.3. Kebijakan Travel Ban sebagai Emergency Response dalam Proses Sekuritisasi.....	100
BAB IV Kesimpulan.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Afiliasi Imgran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Muslim dengan Terorisme.....	39
Tabel 3.1. Penggalan Pidato Donald Trump di Mt. Pleasant, South Carolina.....	63
Tabel 3. 2. Penggalan Wawancara Donald Trump dengan CNN.....	64
Tabel 3. 3. Penggalan Pidato Donald Trump di Manchester, New Hampshire...	65

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Pertumbuhan Populasi Imigran di Amerika Serikat.....	32
Grafik 3.1. Peningkatan Perolehan Suara Trump Setiap Terjadi Kenaikan Frekuensi Pemberitaan Sebesar 1%.....	71
Grafik 3.2. Linimasa Penerimaan Publik AS terhadap Travel Ban Menurut Temuan Lembaga Survey.....	76

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1. Negara Asal Populasi Muslim di Amerika Serikat.....	33
Diagram 2.2. Agama Penduduk Amerika Serikat.....	34
Diagram 2.3. Pandangan Imigran Muslim terhadap Amerika Serikat dan Terorisme.....	44

Diagram 3.1. Dukungan Media Cetak terhadap Kandidat Pemilu Presiden Amerika
Serikat Tahun 2016.....69

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Masuknya warga negara asing ke wilayah suatu negara merupakan fenomena yang sangat lazim dalam studi hubungan internasional. Meski demikian, bila tidak ditangani dengan hati-hati, hal ini sangat mungkin mendatangkan masalah bagi negara penerima, diantaranya menyangkut ketenagakerjaan, kependudukan, kriminalitas, dan penyebaran penyakit. Akibat masalah-masalah di atas, para imigran seringkali dicap sebagai pengaruh negatif bagi suatu negara.¹ Belakangan, sentimen ini menguat bagi kelompok-kelompok tertentu, salah satunya imigran Muslim. Hal ini tidak lain adalah akibat dari kemunculan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama Islam dalam melakukan aksi teror seperti *ISIS* dan pendahulunya, *Al-Qaeda*.²

Perbedaan budaya pun semakin memperlebar jarak antara imigran Muslim dengan kelompok etnis mayoritas, khususnya di negara-negara Barat. Hal ini tentu merupakan tantangan bagi para imigran Muslim dalam berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Sayangnya, insiden demi insiden kian memperburuk persepsi tentang Muslim di mata publik. Salah satu negara di mana fenomena ini marak ditemui adalah Amerika Serikat. Akibat sejumlah serangan oleh kelompok-kelompok

¹ Myron Weiner, "Migration and Security," dalam Christopher W. Hughes dan Lai Yew Meng, ed., *Security Studies: A Reader* (New York: Routledge, 2011), 253-260.

² Todd Green, "Teaching Islamophobia in the Age of ISIS," dalam Dorrol M. Courtney, ed., *Teaching Islamic Studies in the Age of ISIS, Islamophobia, and the Internet* (Indiana: Indiana University Press, 2019), 104-115.

radikal, timbul ketakutan dan kewaspadaan terhadap penduduk Muslim di Amerika Serikat, khususnya imigran, dalam beberapa tahun terakhir.³

Salah satu momentum yang menjadi lahan subur bagi berkembangnya diskursus seputar isu imigrasi di Amerika Serikat adalah pemilu presiden yang berlangsung pada tahun 2016 silam. Menurut survei yang dilakukan oleh *Pew Research Center*, sebanyak 70% dari pemilih yang terdaftar menganggap imigrasi sebagai isu yang sangat menentukan pilihan mereka.⁴ Hal tersebut tampaknya sengaja dimanfaatkan oleh salah satu kandidat, yaitu Donald Trump. Dengan slogan “*Make America Great Again*,” ia membawa reformasi imigrasi sebagai salah satu agenda utama dalam rangkaian kampanyenya. Sebagai solusi terhadap berkembangnya ideologi radikal dan klaimnya tentang kegagalan sistem imigrasi di Amerika Serikat, Donald Trump mengusung kebijakan yang disebut dengan *Travel Ban*.⁵

Pada dasarnya, *Travel Ban* adalah kebijakan yang melarang warga dari tujuh negara yang berpenduduk mayoritas Muslim atau yang berafiliasi dengan kelompok atau jaringan teroris untuk memasuki wilayah Amerika Serikat. Ketujuh negara tersebut adalah Iran, Irak, Libya Somalia, Sudan, Yaman, dan Suriah.⁶ Kebijakan ini juga sering dirujuk oleh media dengan sebutan *Muslim Ban*. Di samping kontroversi yang ditimbulkan, kebijakan ini ternyata menarik banyak simpati dan

³ “US Terrorist Attacks Fast Facts,” *CNN*, 15 Januari 2020.

⁴ “Top Voting Issues in 2016 Election,” *Pew Research Center*, 7 Juli 2016.

⁵ Tara Golshan, “Read Donald Trump’s Most Inflammatory Speech yet on Muslims and Immigration,” *Vox*, 13 Juni 2016.

⁶ Executive Office of the President, *Executive Order 13679*, 27 Januari 2017, 82 FR 8977, Washington D.C., 8977-8982.

sukses menjadi salah satu batu loncatan bagi Trump untuk memenangkan pemilu pada 9 November 2016.⁷

Travel Ban adalah contoh hasil dari proses sekuritisasi terhadap isu imigrasi, yang secara tradisional bukan merupakan isu keamanan. Dalam hal ini, *Travel Ban* adalah contoh yang paling aktual, meski bukan satu-satunya yang pernah diberlakukan di Amerika Serikat. Proses sekuritisasi pun sangat menentukan dalam konstruksi *Travel Ban* sebagai sebuah kebijakan, serta sangat berpengaruh terhadap implementasinya kedepan.

1.2. Identifikasi Masalah

Tepat seminggu setelah dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengeluarkan Perintah Eksekutif No. 13769 dengan nama “*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States.*” Kebijakan yang kemudian dikenal sebagai *Travel Ban* versi pertama atau *Travel Ban 1.0* ini melarang warga asal tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim atau yang diduga berafiliasi dengan jaringan teroris, yaitu Iran, Irak, Libya Somalia, Sudan, Yaman, dan Suriah, untuk memasuki Amerika Serikat selama 90 hari sejak diberlakukan. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga menutup pintu bagi pengungsi dari negara manapun selama 120 hari, serta secara permanen bagi pengungsi asal Suriah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi waktu kepada pemerintah untuk meneliti resiko keamanan dari negara-negara yang terdampak sebelum merumuskan kebijakan yang bersifat permanen.⁸

⁷ “US Election 2016 Result: Trump Beats Clinton to Take White House” *BBC*, 9 November 2016.

⁸ Executive Office of the President, *Executive Order 13679*, 27 Januari 2017, 82 FR 8977, Washington D.C., 8977-8982.

Sejak pertama kali diberlakukan pada 27 Januari 2017, kebijakan *Travel Ban* langsung menuai protes dari berbagai kalangan, tidak hanya di Amerika Serikat, melainkan juga di negara-negara lain. Seiring perjalanannya pun, kebijakan ini mengalami sejumlah revisi bahkan pembatalan akibat dipertanyakan secara hukum.⁹ Bila ditinjau kembali, banyaknya reaksi negatif terhadap kebijakan ini tentu merupakan indikasi akan adanya hal-hal ganjil di dalamnya.

Dalam kurun waktu kurang dari seminggu sejak pertama kali diberlakukan, terjadi ratusan aksi protes terhadap *Travel Ban* yang tersebar di hampir setiap negara bagian di Amerika Serikat, dengan New York, Texas, dan California sebagai konsentrasi utama. Fenomena serupa juga ditemui di belasan negara lain, diantaranya Inggris, Kanada, dan Australia.¹⁰

Demonstrasi-demonstrasi tersebut berlangsung di tempat-tempat umum seperti balai kota, institusi pendidikan, kantor-kantor pemerintah, dan terlebih bandar udara. Hal tersebut mengingat banyaknya calon penumpang, bahkan penumpang yang terpaksa membatalkan perjalanannya atau terjebak karena sudah terlanjur tiba di Amerika Serikat namun tidak diperbolehkan melewati gerbang imigrasi. Akibatnya, ribuan orang terdampar di bandara-bandara di seluruh Amerika Serikat, termasuk mereka yang datang untuk mencari perlindungan dan pertolongan medis.¹¹

Setelah kekacauan pada masa awal penerapannya mereda, *Travel Ban* tetap membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan banyak orang di Amerika

⁹ IABA, *Two Years in Crisis: The Devastating Impact of the Travel Ban*, Laporan (2019), 5-14.

¹⁰ Chris Riotta, "Nationwide Protest Erupt After Supreme Court Upholds Trump's Travel Ban," *Independent*, 26 Juni 2018.

¹¹ Ibid.

Serikat maupun negara-negara lain, di mana tidak sedikit diantaranya adalah negatif. Salah satu komunitas yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan ini adalah keluarga-keluarga hasil kawin campur atau pasangan yang salah satunya masih berkewarganegaraan asing, khususnya yang berasal dari negara-negara yang terdampak oleh larangan memasuki Amerika Serikat. Banyak diantara keluarga-keluarga tersebut harus terpisah karena tengah bepergian ke luar negeri ketika *Travel Ban* diberlakukan, biasanya untuk kepentingan mengunjungi kampung halaman. Dalam banyak kasus, anggota keluarga tersebut baru kembali setelah *Travel Ban* diberlakukan sehingga tidak diperbolehkan memasuki Amerika Serikat dan otomatis terpisah dari keluarganya di sana.¹²

Travel Ban juga menimbulkan keresahan di kalangan industri dan pelaku bisnis. Hal ini tercermin dalam lebih dari 175 pernyataan keberatan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan seperti *Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, dan Google* ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Sebabnya, mereka mengeluhkan banyaknya tenaga profesional yang kehilangan izin untuk bekerja di Amerika Serikat, sehingga menurunkan kapasitas produksi dan menghambat kelangsungan bisnis. Tidak hanya itu, *Travel Ban* juga berdampak pada turunnya nilai investasi di perusahaan-perusahaan tersebut, terlebih mengingat banyaknya investor yang berasal dari negara-negara di kawasan Timur Tengah.¹³

Parahnya lagi, akibat sulitnya keadaan yang diakibatkan oleh *Travel Ban* bagi sebagian orang, banyak pula ditemui kasus-kasus depresi, gangguan jiwa,

¹² IABA, *Two Years in Crisis: The Devastating Impact of the Travel Ban*, Laporan (2019), 24-25.

¹³ United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, *Brief Technology Companies as Amici Curiae in Support of Appellees*, 21 April 2017, No. 17-15589, State of Hawaii, 10-14.

bahkan bunuh diri setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Salah satunya adalah seorang warga negara Yaman yang ditemukan gantung diri setelah mengetahui bahwa visa yang diajukan oleh keluarganya ditolak pada pertengahan 2018 lalu.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan *Travel Ban* memiliki implikasi yang sangat luas dan mencakup hampir setiap aspek kehidupan bagi banyak orang, khususnya mereka yang berasal dari ketujuh negara yang terdampak, baik yang tinggal di Amerika Serikat maupun di negaranya masing-masing. Masalahnya, tidak sedikit dari dampak-dampak di atas yang mempengaruhi kehidupan mereka secara negatif.

Perhatian pun perlu ditujukan pada tujuan awal dari kebijakan *Travel Ban* itu sendiri, yaitu melindungi warga Amerika Serikat dari ancaman berupa teror dan radikalisme. Mengingat banyaknya kepentingan yang telah dikorbankan, khususnya dari kalangan yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan ancaman-ancaman tersebut, penting untuk mengkaji hal-hal yang mempengaruhi implementasi dari kebijakan ini, diantaranya proses sekuritisasi terhadap isu imigrasi di Amerika Serikat. Karena proses tersebut berlangsung paling intens selama masa kampanye pemilu presiden tahun 2016 hingga diberlakukannya kebijakan *Travel Ban* di Amerika Serikat, pada periode itulah penulis akan memfokuskan penelitian ini.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam upaya Donald Trump untuk mengangkat isu imigrasi selama masa kampanye pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2016, *Travel Ban* bukanlah satu-satunya kebijakan yang diusung. Sebelumnya, pidato Trump pada Juli 2015 pun

¹⁴ Elliott C. McLaughlin, "Yemeni Mother Wins Visa Fight to See Her Dying Child in a California Hospital," *CNN*, 18 Desember 2018.

sempat menarik perhatian publik usai memuat pernyataan sang calon presiden tentang wacana untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko untuk mencegah masuknya imigran ilegal ke Amerika Serikat.¹⁵ Terkait dengan kehadiran imigran Muslim di Amerika Serikat, Trump juga sempat menyatakan akan menutup masjid-masjid yang dicurigai menjadi pusat pengembangan ideologi radikal dan membuat *database* serta identifikasi khusus untuk seluruh penduduk Muslim di Amerika Serikat.¹⁶ Meski demikian, penulis memilih untuk fokus pada upaya sekuritisasi yang dilakukan melalui kebijakan *Travel Ban*, khususnya versi pertama yang melarang warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Yaman, dan Suriah untuk memasuki Amerika Serikat.¹⁷ Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan lainnya tidak akan dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, aktor-aktor yang penulis kaji dipilih menurut kesesuaiannya dengan kerangka teori sekuritisasi. Aktor-aktor tersebut terbagi menjadi *existential threat*, *securitizing actor*, *functional actor*, dan *audience* yang masing-masing akan diidentifikasi pada bagian-bagian selanjutnya.¹⁸ Secara garis besar, aktor-aktor tersebut mencakup Trump, media massa di Amerika Serikat, serta seluruh penduduk Amerika Serikat, khususnya imigran Muslim dan mereka yang memiliki hak pilih dalam pemilu presiden tahun 2016.

Berkaitan dengan pembatasan waktu dalam topik yang diteliti, penulis akan fokus pada periode antara 16 Juni 2015 hingga 27 Januari 2017. Kedua tanggal

¹⁵ William Cummings, "A Wall is a Wall! Trump Declares," *USA Today*, 25 Juli 2015.

¹⁶ Tara Golshan, "Read Donald Trump's Most Inflammatory Speech yet on Muslims and Immigration," *Vox*, 13 Juni 2016.

¹⁷ Executive Office of the President, *Executive Order 13679*, 27 Januari 2017, 82 FR 8977, Washington D.C., 8977-8982.

¹⁸ Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), 13-26.

tersebut masing-masing adalah, tanggal diumumkannya pencalonan Trump sebagai presiden Amerika Serikat¹⁹ dan tanggal diberlakukannya kebijakan *Travel Ban*.²⁰ Periode ini dipilih karena merupakan waktu di mana proses sekuritisasi efektif berlangsung. Lebih tepatnya, proses tersebut dimulai ketika Trump mengangkat isu imigrasi dalam kampanye yang ia bawakan dan berakhir ketika kebijakan *Travel Ban* diberlakukan sebagai respon darurat terhadap ancaman. Selain itu, periode ini juga dipilih karena memungkinkan penulis untuk memperoleh data dan materi yang melimpah, sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian.

1.4. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Donald Trump melakukan sekuritisasi masyarakat (*societal*) terkait isu hadirnya imigran asal tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim sebagai ancaman terhadap identitas komunal Amerika Serikat melalui kebijakan *Travel Ban*?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana Donald Trump melakukan sekuritisasi masyarakat (*societal*) terkait isu hadirnya imigran asal tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim sebagai ancaman terhadap identitas komunal Amerika Serikat melalui kebijakan *Travel Ban*.

¹⁹ "Here's Donald Trump's Presidential Announcement Speech," *Time*, 16 Juni 2015.

²⁰ Michael D. Shear dan Helene Cooper, "Trump Bars Refugees and Citizens of 7 Muslim Countries," *New York Times*, 27 Januari 2017.

1.6. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang ingin dicapai, penulis meyakini bahwa penelitian ini akan mendatangkan sejumlah manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya:

1. Manfaat akademis

- a) Memberi kontribusi ilmiah terhadap kajian mengenai sekuritisasi dan kebijakan *Travel Ban*
- b) Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sekuritisasi atau kebijakan *Travel Ban*.

2. Manfaat praktis

- a) Menjadi alternatif referensi tambahan bagi para pemerhati kebijakan *Travel Ban* dan pembuat kebijakan terkait.
- b) Mengartikulasikan aspirasi masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan *Travel Ban* ke kalangan yang lebih luas.
- c) Menyalurkan minat penulis tentang kebijakan *Travel Ban* dan kajian-kajian yang berkaitan dengannya.

1.7. Kajian Pustaka

Masalah keamanan merupakan salah satu pokok bahasan yang paling dinamis dalam studi hubungan internasional. Hal ini mengingat setiap fenomena yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman berpotensi melahirkan pemahaman baru mengenai apa yang dianggap sebagai ancaman oleh umat manusia. Studi mengenai keamanan pun senantiasa diperbaharui dengan cakupan yang

semakin luas dari waktu ke waktu.²¹ Untuk itu, terdapat sejumlah pemikiran yang penulis jadikan sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini.

New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century-Barry Buzan (1991)

Dalam literatur ini, Buzan berargumen bahwa Perang Dingin adalah peristiwa tonggak yang menandai perluasan dalam studi keamanan kontemporer. Perluasan tersebut merupakan konsekuensi dari sejumlah fenomena pasca Perang Dingin, khususnya menyangkut pola hubungan antara aktor-aktor utama dalam politik internasional. Fenomena-fenomena tersebut adalah: perubahan struktur internasional menjadi multipolar; meredanya persaingan ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur; dominasi negara-negara kapitalis; serta menguatnya peran masyarakat internasional. Fenomena-fenomena di atas pun melahirkan isu-isu baru yang menuntut diperluasnya lingkup kajian keamanan tradisional menjadi: keamanan politik; keamanan militer; keamanan ekonomi; keamanan kemasyarakatan; dan keamanan lingkungan.²²

Dalam penelitian ini, konsep-konsep di atas sangat penulis butuhkan dalam menjelaskan isu imigrasi sebagai bagian dari fenomena baru dalam kajian keamanan. Kelebihan lain dari pemikiran Buzan adalah kemampuannya dalam menjelaskan awal dari kemunculan isu-isu baru dalam studi mengenai keamanan di abad ke-21.

²¹ Barry Buzan dan Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies* (New York: Cambridge University Press, 2009), 187-191.

²² Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty First Century," *International Affairs* 67, No. 3 (1991): 431-451.

Security: A New Framework for Analysis, Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde (1998)

Buku ini adalah rujukan utama untuk studi yang mengacu pada pemikiran-pemikiran dalam Mazhab Copenhagen (*Copenhagen School*). Dalam buku ini, Buzan, dkk. menjelaskan mengenai ketiga konsep yang menjadi kontribusi utama dari Mazhab Copenhagen, yaitu *sectors*, *regional security complex*, dan *securitization*, serta kaitan di antara ketiganya dalam menyusun kerangka baru untuk studi keamanan internasional. Buku ini bertujuan untuk memperbaharui kerangka sebelumnya yang telah menjadi semakin tidak relevan akibat berakhirnya Perang Dingin dan kemunculan fenomena-fenomena baru yang diakibatkan olehnya.²³

Kelebihan dari buku ini adalah kemampuannya dalam memberikan penjelasan yang spesifik untuk masing-masing sektor keamanan tentang keterkaitan antara ketiga konsep utama di dalamnya. Buku ini akan penulis gunakan untuk menjelaskan garis besar dari pemikiran-pemikiran dalam Mazhab Copenhagen, sebagai pengantar menuju teori sekuritisasi yang merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Kemudian, penulis akan menerapkan teori sekuritisasi yang dimuat di buku ini dalam analisa terhadap kasus.

Immigration Policy and Security-Terri E. Givens, Gary P. Freeman, dan David L. Leal (2009)

Berbeda dengan kedua literatur sebelumnya, Givens, dkk. memilih fokus pada isu imigrasi sebagai salah satu sumber ancaman bagi keamanan nasional suatu

²³ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A*, 1-5.

negara. Dalam buku ini, mereka mengulas kebijakan-kebijakan imigrasi di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan sejumlah negara di Eropa yang dikhususkan untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional di negara yang bersangkutan. Salah satu subjek yang paling banyak dibahas dalam buku ini adalah kekhawatiran negara-negara akan arus migrasi penduduk pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Menurut Givens, dkk., ancaman yang datang dari sektor imigrasi biasanya diasosiasikan dengan tindakan teror yang dilakukan oleh imigran, khususnya yang datang dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Selain pada peristiwa 9/11, fenomena serupa juga dapat ditemui dalam sejumlah insiden teror yang dibahas di dalam buku ini.²⁴

Mengingat topik yang penulis angkat adalah menyangkut proses yang terjadi dalam konstruksi sebuah kebijakan imigrasi, buku ini sangat berguna untuk mengidentifikasi poin-poin utama dalam kebijakan *Travel Ban*, dengan cara membandingkannya dengan kebijakan-kebijakan serupa yang pernah diterapkan sebelumnya. Tidak hanya itu, buku ini juga membantu penulis memahami garis besar dari arah dan kecenderungan kebijakan-kebijakan imigrasi di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat.

Selain karena memuat konsep-konsep yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis juga memilih ketiga literatur di atas karena setuju dengan gagasan-gagasan utama yang diusung oleh masing-masing literatur. Hal ini mengingat semakin beragamnya isu-isu yang dapat mengancam keamanan nasional suatu negara, sehingga menuntut perluasan pada studi mengenai keamanan dengan imigrasi

²⁴ Terri E. Givens, Gary P. Freeman, and David L. Leal, *Immigration Policy and Security* (New York: Routledge, 2009), 1-10.

sebagai salah satu fokus barunya. Selain itu, penulis juga mengakui pentingnya kontribusi teori sekuritisasi dalam menjelaskan fenomena-fenomena internasional yang berkaitan dengan situasi darurat di suatu negara akibat isu-isu keamanan non-tradisional.

1.8. Kerangka Pemikiran

Seiring munculnya fenomena-fenomena baru yang menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional negara-negara, lingkup kajian studi keamanan pun mengalami perluasan. Hal ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran yang menjelaskan pergeseran fokus dalam studi keamanan tradisional ke isu-isu yang bersifat non-tradisional.²⁵ Jika para pemikir realis seperti Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz beranggapan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional negara hanya mungkin datang dari sektor militer,^{26, 27} studi keamanan non-tradisional mencoba menunjukkan bahwa ancaman serupa dapat muncul dari isu-isu non-militer.²⁸

Copenhagen School adalah salah satu tradisi yang merupakan bagian dari pendekatan non-tradisional dalam studi keamanan internasional, dengan Barry Buzan sebagai salah satu pelopornya.²⁹ Meski Buzan juga dikenal berkat kontribusinya terhadap pemikiran-pemikiran realis dan konstruktivis, penulis akan

²⁵ Paul Rogers, "Peace Studies," dalam Alan Collins, ed., *Contemporary Security Studies (4th ed.)* (Oxford: Oxford University Press, 2016), 61-64.

²⁶ Hans Morgenthau, *Politics Among Nations: Struggle for Power and Peace* (New York: Alfred A. Knoff, 1948), 88-91.

²⁷ Kenneth N. Waltz, *Man, State, and War* (New York: Columbia University Press, 1959), 158-165.

²⁸ Buzan dan Hansen, *The Evolution*, 200-208.

²⁹ *Ibid*, 212.

menggunakan pemikiran-pemikiran Buzan dalam *Copenhagen School* sebagai rujukan utama dalam penelitian ini.

Menurut Buzan, konsep keamanan dalam studi hubungan internasional menekankan pada *survival* atau kemampuan suatu negara untuk bertahan hidup. Artinya, masalah bagi keamanan nasional suatu negara adalah hal-hal yang mengancam kelangsungan hidup negara tersebut. Dalam karyanya yang berjudul *New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century*, Buzan menggolongkan isu-isu yang termasuk ke dalam studi keamanan kontemporer menjadi: keamanan militer; keamanan politik; keamanan ekonomi; keamanan kemasyarakatan; dan keamanan lingkungan.³⁰

Kemunculan aspek-aspek baru dalam studi keamanan menurut *Copenhagen School* bertolak dari asumsi bahwa sebuah isu tidak dengan sendirinya menjadi ancaman bagi keamanan nasional suatu negara, melainkan harus melalui proses konstruksi secara politik terlebih dahulu. Proses inilah yang menentukan bagaimana keamanan dimaknai dan dijadikan sebagai basis dalam memutuskan apakah suatu isu merupakan ancaman bagi negara bersangkutan. Dengan kata lain, isu apapun dapat memasuki ranah keamanan apabila telah melalui proses ini. Dalam *Copenhagen School*, proses ini disebut dengan sekuritisasi.³¹

Sekuritisasi adalah proses di mana suatu isu yang secara tradisional tidak termasuk dalam cakupan bidang keamanan, dipromosikan menjadi isu keamanan. Karena prosedur keamanan yang ada biasanya belum mengakomodir penanganan

³⁰ Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty First Century," 439-450.

³¹ Matt McDonald, "Copenhagen School," dalam Paul D. Williams, *Security Studies: An Introduction* (New York: Routledge, 2008), 68.

terhadap isu baru tersebut, hal ini menuntut dilakukannya respon yang bersifat darurat atau yang disebut dengan *emergency response*.³²

Dalam hal ini, penting untuk membedakan antara sekuritisasi dan politisasi. Menurut Buzan, dkk., politisasi berarti mengangkat suatu isu sebagai diskursus untuk dipertimbangkan dan diputuskan secara terbuka sehingga menuntut pertanggungjawaban pada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini berbeda dengan sekuritisasi yang memperlakukan suatu isu sebagai hal yang bersifat darurat dan istimewa sehingga dikecualikan dari proses politik yang berlaku pada situasi normal. Dengan kata lain, sekuritisasi adalah bentuk ekstrim sekaligus kebalikan dari politisasi.³³

Bila konsep keamanan bersifat *self-referential* karena dimaknai sesuai tafsir yang dikembangkan oleh subjek, proses sekuritisasi bersifat intersubjektif karena merupakan hasil dari interaksi antar subjek. Hal ini tercermin dalam tahapan yang disebut dengan *speech act*.³⁴

Speech act adalah narasi lisan yang berisi upaya untuk mengidentifikasi *existential threat*, yaitu ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara, dan bertujuan untuk meyakinkan publik akan perlunya *emergency response* untuk mengatasi ancaman tersebut. *Existential threat* sendiri dapat berupa ancaman yang sudah ada namun dikemas secara berbeda, maupun hanya dibuat-buat untuk mencapai kepentingan tertentu.³⁵

³² Ole Weaver, "Securitization and Desecuritization," dalam Ronnie Lipschutz, ed., *On Security* (New York: Columbia University Press, 1995), 46-86.

³³ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A*, 29

³⁴ Thierry Balzacq, *Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve* (New York: Routledge, 2011), 3.

³⁵ Op cit, 27-31.

Melalui *speech act* inilah isu yang hendak disekuritisasi memperoleh sarana untuk diartikulasikan ke lingkup yang lebih luas, serta kesempatan untuk menjadi bagian dari diskursus publik. Idealnya, hal ini kemudian berakibat pada timbulnya kesadaran massal akan pentingnya memberi respon terhadap *existential threat* sesuai dengan *emergency response* yang diusung dalam *speech act*. Apabila hal ini terjadi, maka isu yang diangkat pun dapat dikatakan telah tersekuritisasi. Dengan kata lain, *speech act* adalah manifestasi dari proses sekuritisasi itu sendiri.³⁶

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan pendekatan *speech act* sebagai pedoman dalam menganalisis kasus yang diangkat. Untuk itu, bagian pembahasan yang dimuat dalam setiap sub-bab kedua di bab-bab selanjutnya akan diperuntukkan bagi analisis terhadap ketiga komponen utama dalam pendekatan *speech act* (*existential threat*, *speech act*, dan *emergency response*). Lebih tepatnya, sub-bab 2.2. akan memuat analisis tentang *existential threat*, sementara sub-bab 3.2. akan memuat analisis tentang *speech act*, dan *emergency response*.

Hal lain yang penting untuk dipahami dalam pendekatan *speech act* adalah pentingnya peran publik, atau yang disebut sebagai *audience*, selaku target dari proses sekuritisasi. Hal ini tidak lain merujuk pada masyarakat di negara bersangkutan atau kalangan tertentu yang berkepentingan. *Audience* menjadi penting karena merekalah yang menentukan keberhasilan dari suatu proses sekuritisasi. Hal ini mengingat proses tersebut sejatinya ditujukan untuk membentuk persepsi publik. Akibatnya, suatu isu tidak dapat dikatakan telah tersekuritisasi atau telah terpromosi menjadi isu keamanan apabila tidak diakui oleh publik sebagai

³⁶ Ibid, 26.

ancaman. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan suatu proses sekuritisasi bergantung pada sejauh mana *audience* mengakui ancaman yang dibawakan di dalam *speech act*.³⁷

Selain itu, keberhasilan dalam meyakinkan *audience* juga penting karena berkaitan dengan justifikasi untuk *emergency response* yang hendak dilakukan. Mengingat sifatnya yang darurat, seringkali sebuah *emergency response* harus mendobrak aturan atau hukum yang berlaku pada situasi normal. Tanpa dukungan publik, hal ini tentu dapat memicu gejolak domestik dan mengacaukan dinamika dari proses sekuritisasi yang tengah berlangsung.³⁸

Kembali ke soal sifat intersubjektif dari proses sekuritisasi, subjek-subjek yang saling berinteraksi dalam proses sekuritisasi disebut dengan unit analisis. Menurut Ole Weaver, ada tiga unit analisis dalam pendekatan *speech act*, yaitu *referent object*, *securitizing actor*, dan *functional actor*.³⁹

Referent object adalah entitas yang berusaha dilindungi dari ancaman, khususnya melalui *emergency response* yang hendak dilakukan. Dalam proses sekuritisasi, suatu isu dipromosikan ke ranah keamanan karena dianggap mengancam kelangsungan *referent object* tertentu. Meski dinamakan “*object*,” suatu *referent object* tetap bertindak sebagai subjek dalam konteks mempengaruhi unit-unit lain untuk bertindak, atau bahkan bertindak secara langsung. Sebuah negara, misalnya, dapat bertindak sebagai *referent object* sekaligus pelaksana dari *emergency response* untuk isu yang sama. Walaupun biasanya merujuk pada negara,

³⁷ Thierry Balzacq, “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience, and Context,” *European Journal of International Relations* 11, No. 2 (2005): 179-182.

³⁸ Balzacq, *Securitization Theory*, 11-15.

³⁹ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A*, 36.

sejatinya entitas apapun dari tingkat analisis manapun dapat dijadikan sebagai *referent object* dalam sebuah *speech act*, tergantung pada aspek atau bidang keamanan mana yang tengah disorot.⁴⁰

Selanjutnya, pihak yang membawakan *speech act* sekaligus menginisiasi dimulainya sebuah proses sekuritisasi disebut sebagai *securitizing actor*. Biasanya, seorang *securitizing actor* adalah figur yang berpengaruh atau berkuasa di suatu negara (pejabat pemerintahan atau tokoh masyarakat) dan menggunakan pengaruh tersebut untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap isu yang hendak disekuritisasi. Meski demikian, kedudukan yang strategis juga memungkinkan *securitizing actor* untuk menjadikan *speech act* sebagai sarana untuk mencapai kepentingan pribadi. Itulah sebabnya, sebuah upaya sekuritisasi biasanya tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor politis atau bahkan murni didasari oleh kepentingan politis.⁴¹

Selain itu, pihak-pihak lain yang juga aktif mempengaruhi dinamika dari proses sekuritisasi tanpa menjadi *referent object* atau *securitizing actor* disebut sebagai *functional actors*. Biasanya, *functional actors* adalah pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait suatu isu keamanan. Hal ini memiliki cakupan yang luas, mulai dari pejabat pemerintah hingga swasta, serta berbeda-beda menurut sektor yang tengah dijadikan perhatian. Seorang direktur pabrik, misalnya, dapat menjadi *functional actors* ketika limbah yang dihasilkan pabriknya mencemari sumber-sumber air dan dipersepsikan sebagai ancaman bagi

⁴⁰ Ibid, 36.

⁴¹ Paul Roe, "Actor, Audience(s) and Emergency Measures: Securitization and the UK's Decision to Invade Iraq," *Security Dialogue* 36, No. 6 (2008): 615-635.

keamanan lingkungan oleh masyarakat di negara maupun wilayah yang terdampak.⁴²

Selain unit analisis, kelangsungan *speech act* juga dipengaruhi oleh *facilitating conditions*, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan publik terhadap narasi yang dibawakan serta keberhasilan *speech act* secara keseluruhan. *Facilitating conditions* memiliki dua aspek, yaitu internal dan eksternal.⁴³

Aspek internal dari *facilitating conditions* menitikberatkan pada unsur-unsur intrinsik dalam sebuah *speech act* yang meliputi *grammar of security*, kesesuaian dengan prosedur keamanan, serta tiga skenario keamanan atau yang disebut dengan *plot*. *Grammar of security* merujuk pada pemilihan kata-kata yang relevan dengan isu, sedangkan prosedur keamanan merujuk pada langkah-langkah atau prinsip yang biasanya dijadikan acuan dalam menangani isu terkait. Sementara, *plot* adalah penggambaran skenario yang mungkin terjadi dalam penanganan isu terkait. Hal ini terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu penekanan akan adanya *existential threat*, *point of no return*, dan *possible way out*. *Point of no return* adalah situasi yang jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan kegagalan untuk mempertahankan *survival* dari *referent object* terkait, sedangkan *possible way out* adalah langkah yang harus diambil untuk mempertahankan *survival* dari *referent object* terkait, atau dengan kata lain merujuk pada *emergency response* yang diusung.⁴⁴

Di sisi lain, aspek eksternal dari *facilitating conditions* dipengaruhi oleh dua variabel. Pertama, semakin tinggi modal sosial yang dimiliki oleh seorang

⁴² Ibid, 618-620.

⁴³ Michael C. Williams, "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics," *International Studies Quarterly* 47 (2003): 514.

⁴⁴ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A*, 31-33.

securitizing actor, maka akan semakin tinggi pula tingkat penerimaan terhadap *speech act* yang ia bawakan. Modal sosial sendiri merujuk pada relasi antara *securitizing actor* dan *audience*, serta pengaruhnya terhadap persepsi *audience*. Dalam hal ini, modal sosial dapat berupa popularitas, reputasi yang baik, kedudukan yang tinggi atau strategis untuk menangani masalah, dll. Kedua, isu yang secara umum dipersepsikan sebagai ancaman atau diasosiasikan dengan hal-hal lain yang dianggap mengancam akan lebih mudah dibawakan dalam *speech act*.⁴⁵

Selain proses sekuritisasi, perhatian juga perlu ditujukan pada landasan berpikir dalam membahas isu imigrasi, terlebih mengingat sentralnya isu ini bagi topik yang penulis angkat. Menurut Alan Collins, migrasi adalah perpindahan sekelompok orang dari tempat asalnya ke sebuah tempat tujuan –biasanya negara lain- untuk menetap, sehingga berpotensi merubah komposisi populasi di negara tujuan.⁴⁶ Orang yang melakukan migrasi disebut sebagai migran, atau yang didefinisikan oleh *International Organization for Migration* sebagai individu yang pindah dari tempat asalnya ke tempat tujuan di dalam maupun luar negeri, baik untuk sementara maupun permanen, serta dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan. Dalam konteks hubungan internasional, fenomena ini disebut dengan emigrasi oleh negara asal dan imigrasi oleh negara tujuan.⁴⁷

Lebih lanjut, Sita Bali mengelompokkan migrasi menjadi dua kategori berdasarkan motivasinya, yaitu *forced* (terpaksa) dan *voluntary* (sukarela). *Forced migration* merujuk pada arus pengungsi akibat perang, bencana alam, persekusi,

⁴⁵ Ibid, 31-33.

⁴⁶ Collins, ed., *Contemporary Security*, 420.

⁴⁷ IOM, *World Migration Report 2020*, Laporan (2020), 20.

maupun peristiwa-peristiwa lain yang mendesak seseorang untuk pindah dari tempat asalnya. Sementara itu, *voluntary migration* biasanya didasari oleh motif ekonomi, baik untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun berwisata, serta dapat dibagi lagi menjadi tiga sub-kategori berdasarkan legalitasnya di negara tujuan, yaitu legal-sementara, legal-permanen, dan ilegal.⁴⁸

Buzan, dkk. sejatinya sudah memuat isu imigrasi dalam salah satu dimensi keamanan modern versinya, yaitu keamanan kemasyarakatan atau *societal security*. Menurutnya, migrasi adalah salah satu isu selain persaingan horizontal, persaingan vertikal dan depopulasi, yang dapat menjadi ancaman terhadap *societal security*. Dalam kasus migrasi, ancaman tersebut berupa pendatang yang membanjiri suatu populasi dalam jumlah signifikan sehingga mengubah komposisi dari populasi tersebut dan merusak identitas bersama yang telah terbentuk berdasarkan komposisi populasi sebelumnya.⁴⁹

Hal ini didukung oleh Myron Weiner dalam karyanya yang berjudul *Migration and Security*. Menurutnya, masalah-masalah terkait migrasi pada dasarnya disebabkan oleh fakta bahwa terdapat lebih banyak populasi yang ingin berpindah daripada tempat yang bersedia menampungnya. Lebih lanjut, Weiner menggolongkan lima skenario di mana migran dapat dipersepsikan sebagai ancaman bagi keamanan suatu negara, salah satunya adalah ketika dianggap merusak identitas budaya di negara penerima. Hal ini terjadi ketika migran dianggap melanggar norma-norma yang membentuk identitas milik sebuah populasi.

⁴⁸ Sita Bali, "Population Movements," dalam Paul D. Williams, *Security Studies: An Introduction* (New York: Routledge, 2008), 471.

⁴⁹ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A*, 121.

Sedangkan keempat skenario lainnya adalah ketika migran dianggap sebagai musuh di negara pengirim sehingga kedatangannya di negara penerima merusak hubungan kedua negara; ketika migran dianggap sebagai ancaman secara politik dan keamanan oleh negara penerima; ketika migran dianggap membawa masalah sosial-ekonomi bagi negara penerima; dan ketika migran digunakan sebagai alat oleh negara pengirim untuk mengancam negara penerima.⁵⁰

Societal security sendiri berfokus pada peran identitas komunal sebagai pemersatu sebuah komunitas atau kelompok. Hal ini dapat berupa suku bangsa, klan, bahasa, norma, negara, kawasan, maupun atribut-atribut lain yang menimbulkan rasa kebersamaan atau yang disebut dengan “we.” Konsekuensinya, *insecurity* atau keadaan tidak aman dalam konteks *societal security* terjadi ketika timbul ancaman terhadap kelangsungan dari sebuah identitas komunal, yang juga berarti ancaman terhadap kelangsungan dari komunitas itu sendiri.⁵¹

Berhubung setiap identitas lahir dari proses yang berbeda-beda, masing-masing memiliki tingkat toleransi terhadap ancaman yang berbeda-beda pula. Komunitas A, misalnya, rentan terhadap ancaman A dan kebal terhadap ancaman B, sedangkan komunitas B sebaliknya. Hal ini disebut dengan *vulnerabilities*. Amerika Serikat sendiri dikategorikan oleh Buzan, dkk. sebagai komunitas yang sangat plural sehingga rentan terhadap perbedaan budaya dan unsur-unsur identitas yang terkandung di dalamnya.⁵²

⁵⁰ Weiner, “Migration and Security,” 256.

⁵¹ Weaver, “Securitization and Desecuritization,” 59-63.

⁵² Ibid, 59-63.

Dalam *societal security*, terdapat dua cara dalam mengatasi ancaman. Pertama, melalui tindakan yang dilakukan langsung oleh komunitas terkait. Kedua, dengan berupaya memindahkan isu ke ranah politik atau menjadikannya agenda negara. Dalam hal ini, salah satu aktor yang dapat menjadi perantara adalah politisi.⁵³

Bagi politisi, peran ini dapat menjadi strategis karena berpeluang memberi akses menuju kekuasaan. Dalam hal ini, aktor-aktor yang memiliki latar belakang politik dan berambisi untuk merebut/memperoleh kekuasaan disebut sebagai *oppositional political forces*. Dalam membawakan sebuah isu, seorang *oppositional political actor* dapat menggunakan narasi yang seolah-olah membela kepentingan kelompok tertentu sebagai dalih untuk merebut kekuasaan. Salah satu strategi yang lazim digunakan adalah membangun opini bahwa masalah yang terjadi adalah akibat dari kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan berujung pada konklusi bahwa sang aktor lebih kompeten sehingga layak menggantikan rezim saat itu.⁵⁴ Dengan kata lain, fenomena ini adalah contoh di mana upaya sekuritisasi dilatarbelakangi oleh motif/kepentingan politik.

Jika pendekatan *speech act* bertindak sebagai kerangka yang menentukan struktur penulisan dalam penelitian ini, konsep *societal security* akan penulis jadikan sebagai bingkai yang membatasi fokus terhadap topik penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan pendekatan *speech act* untuk menganalisis bagaimana Donald Trump mensekuritisasi isu hadirnya imigran asal tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim sebagai ancaman terhadap identitas komunal

⁵³ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A*, 122.

⁵⁴ *Ibid*, 123-124.

Amerika Serikat melalui kebijakan Travel Ban dari sudut pandang *societal security*. Dengan kata lain, fenomena yang akan diteliti adalah sekuritisasi di bidang *societal* atau kemasyarakatan yang dilakukan oleh Trump terkait isu hadirnya imigran asal tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim di Amerika Serikat. Di bagian-bagian selanjutnya, penulis akan merujuk pada fenomena ini dengan sebutan sekuritisasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari hal ini, salah satu fokus penulis akan ditujukan pada identitas komunal di Amerika Serikat dan perannya dalam proses sekuritisasi. Mengingat sulitnya mengidentifikasi identitas tunggal di masyarakat se-plural Amerika Serikat, penulis akan mengacu pada konsep identitas nasional Amerika Serikat menurut Samuel P. Huntington sebagai rujukan untuk identitas komunal dalam penelitian ini. Pemikiran Huntington penulis pilih karena mencakup semua golongan yang ada di Amerika Serikat sehingga cocok dengan konsep identitas komunal menurut Buzan, dkk..

Dalam bukunya, *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*, Huntington berpendapat bahwa hal yang menyatukan seluruh kelompok ras, etnis, dan agama di Amerika Serikat, serta membedakannya dari kelompok-kelompok serupa di negara lain adalah seperangkat nilai yang disebut dengan *American Creed*. Hal ini sejalan dengan pemikiran tokoh-tokoh seperti Thomas Jefferson dan William Tyler Page yang memiliki tafsirnya masing-masing terhadap konsep *American Creed*. Huntington sendiri mendefinisikan *American Creed*

sebagai perwujudan dari nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, individualisme, keterwakilan dalam pemerintah, serta kepemilikan pribadi.⁵⁵

Meski mengatasnamakan seluruh kelompok identitas, *American Creed* juga banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Kristen Protestan yang merupakan agama mayoritas di Amerika Serikat. Menurut Huntington, agama ini paling merepresentasikan kelima nilai dalam *American Creed*, diantaranya melalui ajaran-ajaran untuk mempelajari Alkitab secara mandiri, bertanggung jawab atas nasib sendiri, serta dianutnya sistem kongregasi dalam organisasi Gereja sebagai bentuk perlawanan terhadap hierarki. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya Protestan dianggap sebagai salah satu komponen penting dalam *American Creed*.⁵⁶

Diantara tantangan-tantangan bagi *American Creed* yang dibahas dalam buku Huntington, kedatangan imigran merupakan salah satu yang paling ditekankan. Hal ini karena imigrasi berdampak pada menguatnya unsur-unsur sub-kultur dalam masyarakat yang secara bersamaan memperlemah kohesi antara atribut-atribut pembentuk *American Creed*. Mengingat imigrasi adalah fenomena yang lazim di era ini, Huntington pun menyimpulkan bahwa nilai kebebasan, kesetaraan, individualisme, keterwakilan dalam pemerintah, serta kepemilikan pribadi semata tidak cukup untuk mempertahankan kelangsungan dari *American Creed*. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa kelangsungan *American Creed* juga bergantung pada kesediaan warga Amerika Serikat untuk mengikuti gaya hidup yang berlaku di negara tersebut (berubah-ubah seiring waktu), menggunakan atau

⁵⁵ Samuel P. Huntington, *Who Are We? The Challenges to America's National Identity* (New York: Simon & Schuster, 2004), 41.

⁵⁶ *Ibid*, 68.

mempelajari bahasa Inggris, memahami sejarah dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Amerika Serikat, serta mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Amerika Serikat ketimbang negara asalnya (khusus para imigran).⁵⁷

1.9. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif, atau yang didefinisikan oleh Umar Suryadi Bakry dalam bukunya sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah sosial dan kemanusiaan bagi sekelompok individu. Metode ini dipilih karena studi hubungan internasional memiliki pokok-pokok pembahasan yang cenderung bersifat normatif sehingga sulit diukur dengan angka. Secara khusus, varian dari metode kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu investigasi mendalam terhadap seseorang, kelompok, peristiwa, atau masyarakat.⁵⁸ Dalam hal ini, kasus yang diteliti adalah kebijakan *Travel Ban* dalam kampanye Donald Trump sebagai calon presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Untuk kepentingan pengumpulan data, penulis akan melakukan studi literatur dan peninjauan terhadap dokumen-dokumen yang relevan.⁵⁹ Teknik ini dipilih karena alasan jarak geografis yang tidak memungkinkan penulis terjun langsung ke tengah-tengah objek penelitian yang berada di Amerika Serikat. Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan data dari buku, jurnal, laporan, serta artikel dan sumber-sumber lain di internet.

⁵⁷ Ibid, 222-254 & 339.

⁵⁸ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 14 & 222.

⁵⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

Dari data-data yang diperoleh, penulis akan melakukan analisis dengan mengolah dan menafsirkan data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelahnya, barulah penulis akan memaparkan pandangannya terhadap data yang diperoleh dan menarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.⁶⁰

1.10. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan memuat keseluruhan rancangan penelitian dan bertujuan untuk memberikan pengantar sebelum masuk lebih jauh ke bagian analisa terhadap kasus yang diangkat. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan. Secara garis besar, bagian ini menjelaskan bagaimana kasus yang diangkat menjadi penting untuk diteliti, pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian, hasil-hasil yang diharapkan dari penelitian, serta pemikiran, konsep, dan teori yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB II. Isu Imigrasi di Amerika Serikat Menjelang Pemilu Presiden Tahun 2016 dan Ancaman terhadap Identitas Komunal Amerika Serikat

Pada bab II, penulis akan menjelaskan tentang isu imigrasi sebagai sumber ancaman dalam proses sekuritisasi. Bab II penulis bagi ke dalam dua sub-bab, yaitu *Gambaran Isu imigrasi di Amerika Serikat Menjelang Pemilu Presiden Tahun 2016* yang memuat data dan *Imigran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim sebagai Existential Threat terhadap American Creed* yang memuat analisis. Sub-

⁶⁰ Matthew Miles dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994), 8.

bab pertama kemudian terbagi lagi menjadi *Imigran Muslim dan Komposisi Populasi Amerika Serikat, Identitas Imigran Muslim di Bawah Sorotan Publik Amerika Serikat, dan Persepsi Publik Amerika Serikat dan Imigran Muslim terhadap Satu Sama Lain*, sedangkan sub-bab kedua terbagi menjadi *Kerentanan Societal Security Amerika Serikat terhadap Existential Threat Berupa Imigran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim dan Realita Kehadiran Imigran Asal Tujuh Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim sebagai Existential Threat terhadap American Creed*.

BAB III. Proses Sekuritisasi Masyarakat (Societal) dalam Kampanye Donald Trump sebagai Calon Presiden Amerika Serikat Tahun 2016 melalui Kebijakan Travel Ban

Bab III berisi penjelasan tentang proses sekuritisasi yang terjadi pada masa kampanye pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2016 dan kebijakan *Travel Ban* sebagai respon darurat yang diajukan oleh Donald Trump. Menggunakan struktur yang sama dengan bab II, bab III dibagi menjadi *Kampanye Donald Trump dalam Konteks Proses Sekuritisasi dan Kebijakan Travel Ban sebagai Solusi untuk Masalah Imigrasi di Amerika Serikat* yang memuat data dan *Speech Act Donald Trump pada Masa Kampanye Pemilu Presiden Amerika Serikat Tahun 2016 dan Kebijakan Travel Ban sebagai Emergency Response* yang memuat analisis. Sub-bab pertama kemudian terbagi menjadi *Popularitas Donald Trump sebagai Modal untuk Melakukan Upaya Sekuritisasi, Pandangan Donald Trump terhadap Imigran Muslim di Amerika Serikat, Peran Media Massa dalam Upaya Sekuritisasi Donald Trump, dan Penerimaan Publik Amerika Serikat terhadap Kebijakan Travel Ban*,

sedangkan sub-bab kedua terbagi menjadi *Unit Analisis dalam Speech Act Donald Trump, Facilitating Conditions bagi Speech Act Donald Trump, dan Kebijakan Travel Ban sebagai Emergency Response dalam Proses Sekuritisasi.*

BAB IV. Kesimpulan

Bab IV merupakan simpulan dari keseluruhan proses penelitian. Sebagai penutup, penulis akan mengidentifikasi hasil-hasil penelitian serta menjawab rumusan masalah berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya.

